

**IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA SEKTOR PELAYANAN PUBLIK
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN KERAH BIRU**

*"IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT IN THE PUBLIC SERVICE
SECTOR AS A STRATEGY FOR PREVENTING BLUE-COLLAR CRIME"*

<https://10.0.205.137/jaid.v4i2.639>

Submitted: 12-10-2024 Reviewed: 12-10-2024 Published: 13-11-2024

Catur Susaningsih
Catur.susaningsih@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Atsil Syah Gibran
Teukuatsil@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Andika Ardiansyah
Andika.23ardiansyah@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Abstract. *The implementation of e-government has become a strategic step in enhancing efficiency and transparency in public services, and it holds potential for reducing blue-collar crimes such as corruption and embezzlement. This study analyzes the application of e-government in Indonesia, with a particular focus on its role in preventing blue-collar crime within the public service sector. Using a qualitative approach and case study methodology, the research identifies factors influencing the effectiveness of e-government in crime prevention. The findings indicate that, while e-government has significant potential to improve the quality of public services, its success is heavily dependent on factors such as technological infrastructure, human resource competencies, and supportive policies and regulations. This research contributes valuable insights into the role of e-government in preventing blue-collar crime and offers recommendations for enhancing e-government implementation in Indonesia.*

Keywords: *E-government, Blue-Collar Crime, Public Service*

Abstrak. Implementasi *e-government* telah menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik, serta berpotensi mengurangi kejahatan kerah biru (blue collar crime) seperti korupsi dan penggelapan dana. Penelitian ini menganalisis penerapan *e-government* di Indonesia, khususnya di sektor pelayanan publik, dengan fokus pada upaya pencegahan kejahatan kerah biru. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas *e-government* dalam mencegah kejahatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *e-government* berpotensi besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti infrastruktur teknologi, kompetensi sumber daya manusia, serta dukungan kebijakan dan regulasi. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami peran *e-government* dalam pencegahan kejahatan kerah biru, serta menawarkan rekomendasi untuk peningkatan implementasi *e-government* di Indonesia.

Keywords: *E-government, Kejahatan Kerah Biru, Pelayanan Publik*

1. PENDAHULUAN

E-government, atau pemerintahan elektronik, merupakan sistem pemerintahan yang mengutamakan penggunaan teknologi elektronik untuk



JAID: Journal of Administration and International Development are licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan pekerjaan secara efisien dan tepat waktu. Konsep ini telah menjadi solusi dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis yang menuntut administrasi negara yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, dengan fokus pada pelayanan publik. Implementasi *e-government* di Indonesia telah diterapkan dalam berbagai sektor, termasuk sektor pemerintahan, dengan tujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah serius dalam menerapkan sistem *e-government*. Berbagai kebijakan dan regulasi terkait telah dikeluarkan, seperti Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government* dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Selain itu, pemerintah juga mengarahkan seluruh kementerian yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik untuk mendukung pemerintahan digital dalam instansinya.

Penerapan *e-government* di Indonesia juga melibatkan penggunaan inovasi untuk memungkinkan masyarakat mengakses informasi dan layanan pemerintah secara online. Dengan demikian, diharapkan terciptanya pelayanan yang terkoordinasi dan efisien bagi masyarakat. Melalui langkah-langkah ini, Indonesia terus berupaya memperbaiki sistem pelayanan publiknya agar lebih responsif dan berkualitas.

Pelayanan publik yang berkualitas memang menjadi hak fundamental bagi setiap warga negara. Pelayanan yang baik tidak hanya menciptakan kepuasan bagi masyarakat, tetapi juga mendorong efisiensi dan efektivitas dalam berbagai kegiatan pembangunan nasional. Namun, sayangnya, pelayanan publik yang buruk masih sering terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Pelayanan yang buruk dapat menghambat pembangunan nasional karena menyebabkan waktu dan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk hal lain malah terbuang sia-sia.

Selain itu, pelayanan publik yang buruk juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat yang merasa tidak dilayani dengan baik cenderung akan kehilangan kepercayaan pada pemerintah dan berpotensi mengganggu stabilitas politik dan sosial. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus melakukan upaya-upaya perbaikan dalam pelayanan publik guna membangun kepercayaan masyarakat. Dalam sektor pelayanan publik, sering terjadi kejahatan kerah biru seperti korupsi, penyuapan, dan penggelapan dana. Kejahatan-kejahatan ini merugikan negara dan masyarakat secara langsung karena mengakibatkan penggunaan dana publik yang tidak efisien dan tidak transparan. Upaya pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan kerah biru menjadi sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan dalam pelayanan publik.

Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan upaya-upaya konkret dari pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Langkah-

langkah seperti peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu memperbaiki pelayanan publik. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan kerah biru juga menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Di samping itu, penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal juga diperlukan untuk mencegah terjadinya kejahatan kerah biru. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan para pelaku kejahatan kerah biru akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan yang merugikan negara dan masyarakat. Sebagai upaya preventif, peningkatan kesadaran dan integritas pegawai dalam memberikan pelayanan publik juga harus terus ditingkatkan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus terkait implementasi *e-government* pada sektor pelayanan publik sebagai upaya pencegahan kejahatan kerah biru (*blue collar crime*) dapat didefinisikan sebagai sebuah studi mendalam yang bertujuan untuk memahami bagaimana penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat berperan dalam mencegah terjadinya kejahatan kerah biru. Pendekatan studi kasus ini akan fokus pada satu atau beberapa kasus implementasi *e-government* pada sektor pelayanan publik di suatu daerah atau lembaga pemerintahan, dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi tersebut dalam mencegah terjadinya kejahatan kerah biru.

Dalam konteks ini, penelitian kualitatif akan menggunakan pendekatan studi kasus untuk mengumpulkan data secara mendalam melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif untuk memahami dinamika dan kompleksitas implementasi *e-government* dalam pelayanan publik serta dampaknya terhadap upaya pencegahan kejahatan kerah biru. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran *e-government* dalam pelayanan publik sebagai upaya pencegahan kejahatan kerah biru, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan strategi pencegahan kejahatan kerah biru yang lebih efektif dan efisien.

Perancangan terbatas pada bulan april menuju mei tahun 2024
Perancangan penelitian terbatas pada bulan April menuju Mei tahun 2024 dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: Pertama, pada awal April, fokuslah pada penyusunan proposal penelitian. Hal ini meliputi merumuskan judul penelitian, latar belakang masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian yang akan digunakan, serta jadwal kegiatan. Setelah proposal disusun, langkah berikutnya adalah mereview literatur terkait implementasi *e-government* dalam pelayanan publik dan kejahatan kerah biru. Hal ini penting untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian dan melihat temuan-temuan penelitian sebelumnya.

Kemudian, pertengahan April fokus pada desain metodologi penelitian

kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metodologi ini akan menjadi kerangka kerja utama dalam pengumpulan dan analisis data. Selanjutnya, pada akhir April, lakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak terkait dan analisis dokumen terkait implementasi *e-government*. Hal ini akan memberikan data-data yang diperlukan untuk menganalisis peran *e-government* dalam pelayanan publik sebagai upaya pencegahan kejahatan kerah biru.

3. PEMBAHASAN

3.1. Implementasi *E-government* Di Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Kejahatan Kerah Biru Di Sektor Pelayanan Publik

Pemerintah Indonesia telah mengadopsi konsep *e-government* atau pemerintahan elektronik sebagai salah satu strategi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien. *E-government* merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh pemerintah untuk memberikan layanan publik yang lebih baik kepada masyarakat, termasuk dalam hal menyediakan informasi, berinteraksi dengan masyarakat, dan menyelenggarakan proses administrasi pemerintahan.

Implementasi *e-government* di Indonesia didukung oleh berbagai kebijakan dan regulasi, seperti Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Roadmap *E-government* Nasional 2020-2024. Kebijakan-kebijakan ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk mengembangkan dan mengimplementasikan *e-government* di berbagai sektor pelayanan publik.

Berbagai inisiatif dan program *e-government* telah diluncurkan di Indonesia, termasuk layanan online di berbagai sektor seperti perizinan, pajak, dan pendidikan. Selain itu, portal *e-government* nasional (Indonesia.go.id) dan aplikasi mobile untuk layanan publik juga telah dikembangkan. Melalui berbagai inisiatif ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memudahkan akses masyarakat terhadap layanan publik, dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.

Implementasi *e-government* di Indonesia diharapkan dapat membawa berbagai dampak positif, seperti meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik. Dengan adanya layanan online, proses administrasi publik dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien. Selain itu, *e-government* juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah karena semua informasi dan keputusan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Hal ini dapat membantu dalam mengurangi potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Meskipun banyak potensi positif, implementasi *e-government* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Salah satunya adalah kurangnya infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai. Infrastruktur TIK yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia menjadi kendala dalam menyediakan layanan *e-government* yang merata. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya *e-*

government juga menjadi hambatan, serta adanya kesenjangan digital antara masyarakat yang memiliki akses internet dan yang tidak.

Untuk mengatasi tantangan dan hambatan implementasi *e-government*, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya, antara lain meningkatkan infrastruktur TIK di seluruh wilayah Indonesia, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil dalam bidang TIK, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat *e-government*. Selain itu, perlindungan keamanan siber juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan agar data dan informasi yang disediakan oleh *e-government* tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

3.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas *E-government* Dalam Mencegah Kejahatan Keras Biru

Efektivitas *e-government* dalam mencegah kejahatan keras biru di sektor pelayanan publik dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Salah satu faktor kunci adalah kepemimpinan dan komitmen dari pimpinan di semua level pemerintahan. Kepemimpinan yang kuat dan komitmen yang tinggi dari pimpinan pemerintahan sangat penting untuk memberikan arah yang jelas dan dukungan yang diperlukan untuk implementasi *e-government* yang efektif. Pimpinan yang visioner dan transformatif dapat membantu mendorong perubahan organisasi menuju penerapan *e-government* yang lebih efisien dan efektif.

Pemimpin harus memiliki visi yang jelas pemahaman yang mendalam tentang tujuan *e-government*, seperti meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan publik. Visi yang jelas ini akan menjadi landasan bagi pengambilan keputusan dan arah implementasi. Pemimpin harus mampu mengkomunikasikan visi *e-government* kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pejabat pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Komunikasi yang efektif akan membangun dukungan dan pemahaman yang diperlukan untuk implementasi yang sukses.

Pemimpin harus berkomitmen untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk implementasi *e-government*, termasuk mengalokasikan anggaran yang cukup untuk berbagai aspek *e-government*, seperti pengembangan infrastruktur, pelatihan karyawan, dan pemeliharaan sistem, menambah personel dengan keahlian khusus dalam bidang teknologi informasi, manajemen proyek, dan *e-government*., dan memastikan bahwa organisasi memiliki teknologi yang tepat untuk mendukung *e-government*, seperti perangkat lunak, infrastruktur jaringan, dan platform online.

Selain itu, ketersediaan infrastruktur yang memadai juga sangat penting. Infrastruktur yang mencakup jaringan internet yang stabil dan berkecepatan tinggi, perangkat keras dan perangkat lunak yang handal, serta keamanan siber yang terjamin merupakan dasar yang diperlukan untuk mendukung operasional *e-government*. Tanpa infrastruktur yang memadai, layanan *e-government* tidak dapat berjalan dengan baik dan efektif.

E-government, sebagai transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan, tidak dapat berjalan mulus tanpa infrastruktur yang memadai. Infrastruktur ini bagaikan fondasi kokoh yang menopang operasional *e-government*, memastikan kelancaran dan efektivitas layanan publik.

Terdapat beberapa faktor yang dapat dijadikan latar belakang bagaimana *e-government* dapat berjalan dengan baik.

- a. Jaringan Internet: Arteri Informasi *E-government*
Jaringan internet yang stabil dan berkecepatan tinggi menjadi urat nadi *e-government*. Akses internet yang lancar memungkinkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat, transfer data yang cepat, dan penyampaian informasi secara real-time. Jaringan internet yang lambat atau tidak stabil dapat menghambat proses pelayanan, menimbulkan frustrasi bagi pengguna, dan menghambat pencapaian tujuan *e-government*.
- b. Perangkat Keras dan Perangkat Lunak: Mesin Penggerak *E-government*
Perangkat keras dan perangkat lunak yang handal merupakan mesin penggerak *e-government*. Perangkat keras seperti server, komputer, dan perangkat mobile harus memiliki performa yang mumpuni untuk menampung dan memproses data dalam jumlah besar. Perangkat lunak yang digunakan harus kompatibel, aman, dan mudah digunakan oleh pengguna. Ketidakcocokan perangkat keras dan perangkat lunak, atau perangkat lunak yang tidak aman, dapat menimbulkan gangguan pada operasional *e-government* dan memicu kebocoran data.
- c. Keamanan Siber: Melindungi Jantung *E-government*
Keamanan siber merupakan jantung *e-government* yang perlu dijaga dengan ketat. Data pribadi dan informasi sensitif yang tersimpan dalam sistem *e-government* harus dilindungi dari serangan siber dan pencurian data. Keamanan siber yang kuat mencegah penyalahgunaan data, menjaga privasi pengguna, dan membangun kepercayaan terhadap layanan *e-government*.
- d. Integrasi dan Interoperabilitas: Menyatukan Potensi *E-government*
Integrasi dan interoperabilitas antar sistem *e-government* menjadi kunci untuk memaksimalkan potensi *e-government*. Sistem yang terintegrasi memungkinkan pertukaran data dan informasi secara mulus antar instansi pemerintah, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik. Interoperabilitas antar platform *e-government* memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai layanan dengan mudah dan tanpa perlu berpindah-pindah platform.
- e. Investasi dan Pengembangan Infrastruktur: Memperkuat Fondasi *E-government*
Investasi dan pengembangan infrastruktur *e-government* harus dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk memastikan ketersediaan infrastruktur yang terbaru, terancang, dan aman. Pengembangan infrastruktur *e-government* juga perlu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Sumber daya manusia yang kompeten dan terampil juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan *e-government*. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta memiliki kapasitas yang cukup untuk mengelola dan memelihara infrastruktur *e-government* akan memastikan kelancaran implementasi *e-*

government. Oleh karena itu, investasi dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam bidang TIK menjadi sangat penting.

Selain faktor internal, keikutsertaan dan partisipasi aktif masyarakat juga merupakan faktor penting dalam keberhasilan *e-government*. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya *e-government*, partisipasi dalam pemanfaatan layanan *e-government*, dan budaya pelaporan yang kuat akan membantu memastikan efektivitas *e-government* dalam mencegah kejahatan kerah biru. Masyarakat yang terlibat secara aktif dalam penggunaan *e-government* akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.

Keberhasilan *e-government* tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur dan teknologi yang canggih, tetapi juga oleh keikutsertaan dan partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat bagaikan roda penggerak *e-government* yang mendorong transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan mencapai tujuannya. Berikut adalah faktor-faktor eksternal:

- a. Kesadaran Masyarakat: Fondasi *E-government* yang Kuat
Kesadaran masyarakat tentang pentingnya *e-government* menjadi fondasi yang kokoh bagi keberhasilannya. Masyarakat perlu memahami bahwa *e-government* bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang kemudahan akses terhadap layanan publik, peningkatan efisiensi dan efektivitas, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Kampanye edukasi dan sosialisasi yang gencar, penyediaan informasi yang mudah diakses, dan pelatihan bagi masyarakat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat *e-government*.
- b. Partisipasi dalam Pemanfaatan Layanan *E-government*: Memanfaatkan Potensi *E-government*
Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan layanan *e-government* menjadi kunci untuk memaksimalkan potensinya. Masyarakat perlu didorong untuk menggunakan berbagai layanan *e-government* yang tersedia, seperti pengurusan dokumen kependudukan, pembayaran pajak, dan pengaduan masyarakat. Kemudahan akses dan kemudahan penggunaan layanan *e-government* dapat menarik partisipasi masyarakat dan meningkatkan kepercayaan terhadap *e-government*.
- c. Budaya Pelaporan yang Kuat: Membangun Akuntabilitas *E-government*
Budaya pelaporan yang kuat dalam masyarakat menjadi pilar penting untuk membangun akuntabilitas *e-government*. Masyarakat perlu didorong untuk melaporkan berbagai permasalahan atau penyimpangan yang mereka temukan dalam layanan *e-government*. Pelaporan yang transparan dan akuntabel dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan *e-government* dan mencegah terjadinya korupsi atau penyalahgunaan wewenang.
- d. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Membangun Kepercayaan Masyarakat
Keikutsertaan masyarakat dalam *e-government* dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Masyarakat dapat mengawasi kinerja pemerintah secara lebih mudah melalui platform *e-government*, memantau penggunaan anggaran, dan memberikan masukan dan kritik terhadap kebijakan publik. Transparansi dan akuntabilitas yang terwujud melalui *e-government* dapat

membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperkuat demokrasi.

- e. Mencegah Kejahatan Kerah Biru: *E-government* untuk Keadilan Sosial Keikutsertaan masyarakat dalam *e-government* dapat membantu mencegah terjadinya kejahatan kerah biru, seperti korupsi, penyuapan, dan penyalahgunaan wewenang. Masyarakat yang aktif memantau kinerja pemerintah dan melaporkan berbagai penyimpangan dapat membantu pemerintah dalam menindaklanjuti dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum. *E-government* yang efektif dengan partisipasi aktif masyarakat dapat mewujudkan keadilan sosial dan pemerintahan yang bersih.

Terakhir, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan juga diperlukan untuk memastikan efektivitas *e-government*. Evaluasi berkala terhadap kinerja *e-government*, mekanisme untuk menindaklanjuti hasil evaluasi, dan peningkatan *e-government* secara berkelanjutan akan membantu memastikan bahwa *e-government* terus berkembang dan menjadi alat yang efektif dalam mencegah kejahatan kerah biru di sektor pelayanan publik. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, diharapkan implementasi *e-government* dapat memberikan manfaat yang maksimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencegah kejahatan kerah biru.

Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan efektivitas *e-government* dalam mencegah kejahatan kerah biru. Evaluasi berkala terhadap kinerja *e-government*, baik secara teknis maupun fungsional, perlu dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem. Mekanisme yang jelas untuk menindaklanjuti hasil evaluasi, seperti perbaikan sistem, peningkatan kapasitas SDM, dan penyesuaian kebijakan, harus diimplementasikan dengan cepat dan tepat. Peningkatan *e-government* secara berkelanjutan, mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, juga menjadi faktor penting untuk menjaga efektivitasnya. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, diharapkan implementasi *e-government* dapat memberikan manfaat yang maksimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mencegah kejahatan kerah biru, dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan merupakan elemen penting dalam memastikan efektivitas *e-government* dan memaksimalkan manfaatnya dalam mencegah kejahatan kerah biru. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, *e-government* dapat menjadi alat yang ampuh untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani rakyat.

4. KESIMPULAN

E-government memiliki potensi besar untuk mencegah kejahatan kerah biru di sektor pelayanan publik di Indonesia. Implementasi *e-government* yang efektif dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memudahkan pelacakan aliran dana, dan meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik. Dengan adanya *e-government*, informasi mengenai kebijakan, prosedur, dan hasil pelayanan publik dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, sehingga memungkinkan adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Namun, implementasi *e-government* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya infrastruktur yang memadai. Meskipun akses internet semakin merata di Indonesia, masih ada daerah-daerah yang belum terjangkau oleh jaringan internet yang stabil dan berkualitas. Hal ini dapat menghambat penerapan *e-government* di daerah-daerah tersebut. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang terampil dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga menjadi hambatan dalam implementasi *e-government*. Diperlukan investasi yang lebih besar dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia agar mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengelola dan mengembangkan sistem *e-government*.

Selain infrastruktur dan sumber daya manusia, kesadaran masyarakat juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan *e-government*. Masyarakat perlu diberi pemahaman yang lebih baik tentang manfaat dan pentingnya *e-government* dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencegah kejahatan kerah biru. Pemerintah juga perlu melakukan kampanye yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang *e-government*.

Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas *e-government*. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan investasi dalam infrastruktur TIK di seluruh Indonesia. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam bidang TIK. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan implementasi *e-government* di Indonesia dapat mencapai tujuannya dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas *e-government* dalam mencegah kejahatan kerah biru di Indonesia adalah dengan meningkatkan kepemimpinan dan komitmen dari pimpinan di semua level. Dukungan dan komitmen yang kuat dari pimpinan diperlukan untuk memberikan arah yang jelas dan motivasi bagi implementasi *e-government* yang efektif. Selain itu, perlu juga diperkuat infrastruktur *e-government* dengan melakukan perluasan jaringan internet, peningkatan kualitas perangkat keras dan perangkat lunak, serta penguatan keamanan siber.

Sementara itu, pengembangan sumber daya manusia juga menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas *e-government*. Pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai dalam menggunakan teknologi *e-government* menjadi hal yang penting untuk memastikan kelancaran implementasi *e-government*. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya *e-government* serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pemanfaatannya.

Di samping itu, memperkuat monitoring dan evaluasi juga diperlukan untuk meningkatkan efektivitas *e-government*. Evaluasi berkala terhadap kinerja *e-government* dan tindak lanjut terhadap temuan evaluasi akan membantu meningkatkan *e-government* secara berkelanjutan. Selain itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang efektivitas *e-government* dalam mencegah kejahatan kerah biru di Indonesia. Penelitian ini dapat fokus pada studi kasus di sektor pelayanan publik tertentu atau analisis komparatif dengan negara lain.

Dengan implementasi *e-government* yang efektif dan partisipasi aktif dari semua pihak, diharapkan kejahatan kerah biru di sektor pelayanan publik di Indonesia dapat diminimalisir dan terwujud pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.

REFERENSI

- Backus, M. (2001). *E-Governance and Developing Countries Introduction and examples E-Governance and Developing Countries Introduction and examples Content Background*.
- Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2010). Using ICTs to create a culture of transparency: *E-government* and social media as openness and anti-corruption tools for societies. *Government Information Quarterly*, 27(3), 264–271. <https://doi.org/10.1016/J.GIQ.2010.03.001>
- Dawes, S. S. (2008). The Evolution and Continuing Challenges of E-Governance. *Public Administration Review*, 68(SUPPL. 1), S86–S102. <https://doi.org/10.1111/J.1540-6210.2008.00981.X>
- Hill, C. J., & Lynn, L. E. (2005). Is hierarchical governance in decline? Evidence from empirical research. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 15(2), 173–195. <https://doi.org/10.1093/JOPART/MUI011>
- Moon, M. J. (2002). The Evolution of *E-government* among Municipalities: Rhetoric or Reality? *Public Administration Review*, 62(4), 424–433. <https://doi.org/10.1111/0033-3352.00196>
- Ndou, V. (2004). E – Government for Developing Countries: Opportunities and Challenges. *Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, 18(1), 1–24. <https://doi.org/10.1002/J.1681-4835.2004.TB00117.X> (PDF) *Public Productivity & Management Review*. (n.d.). Retrieved May 14, 2024, from https://www.researchgate.net/publication/325091986_Public_Productivity_Management_Review
- Peters, B. G. (2021). *Governance Without Government? Rethinking Public Administration*. <https://www.researchgate.net/publication/349427067>
- Sampson, R. J., & Lauritsen, J. L. (1997). Racial and Ethnic Disparities in Crime and Criminal Justice in the United States. *Crime and Justice*, 21, 311–374. <https://doi.org/10.1086/449253>
- Shover, Neal., & Wright, J. Paul. (2001). *Crimes of privilege : readings in white-collar crime*. 432.
- Sollund, R. (2017). M J Lynch and P B Stretesky, Exploring Green Criminology: Toward a Green Criminological Revolution . *Punishment & Society*, 19(4), 514–518. <https://doi.org/10.1177/1462474515575653>

Specifying the Direct and Indirect Effects of Low Self- Control and Situational Factors in Offenders' Decision Making: Toward a More Complete Model of Rational Offending | Office of Justice Programs. (n.d.). Retrieved May 14, 2024, from <https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/specifying-direct-and-indirect-effects-low-self-control-and>

Thompson, F. J., & Riccucci, N. M. (1998). Reinventing government. *Annual Review of Political Science*, 1, 231–257. <https://doi.org/10.1146/ANNUREV.POLISCI.1.1.231>